

BAB II

KONFLIK SOMALIA DAN KETIDAKADILAN PEREMPUAN SOMALIA

Konflik Somalia membawa sejumlah kepedihan mendalam bagi masyarakat Somalia. Pasca runtuhnya Rezim Mohamed S. Barre pada tahun 1991 telah membuka pertempuran baru di antara kelompok-kelompok yang bertikai dan para pemimpin klan yang saling berambisi untuk memenuhi kepentingannya masing masing seperti; persaingan sumber daya, kekuasaan, represi oleh rezim militer dan masih banyak faktor lainnya. Dimana memicu terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, hingga berujung pada bencana kelaparan ribuan orang. Menurut Laporan UNICEF di tahun 2019 menunjukkan bahwa, setengah dari populasi Somalia yakni sebesar 1,5 juta masyarakat Somalia telah terbebani oleh masalah kekerasan dan ketidakstabilan ekonomi hingga kemiskinan ekstrem. Kerawanan pangan akibat kekeringan, tingginya prevalensi penyakit menular, pelanggaran perlindungan anak, khususnya perekrutan dan penggunaan anak dan remaja dalam konflik bersenjata serta bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya (UNICEF, 2019).

Tantangan perang saudara yang akhirnya meluas tidak hanya menyebabkan kehancuran dan memusnahkan generasi. Tetapi, perang saudara juga berdampak pada keberlanjutan proses pembangunan negara. Sebagaimana perang merupakan kunci yang menciptakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bahkan melibatkan adanya ketidakadilan dan kekerasan terutama pada kaum perempuan dan anak-anak.

Tantangan yang memicu adanya ketidakadilan pada perempuan dan anak-anak perempuan di Somalia tak hanya dipengaruhi oleh adanya perang saja. Masih ada beberapa tantangan lain salah satunya adalah masyarakat Somalia yang dicirikan sebagai negara yang menjunjung tinggi patriarki. Terlepas dari perubahan politik dan ekonomi yang luar biasa di abad ke-20, dari pemerintahan kolonial ke pascakolonial, situasi partisipasi dari perempuan belum bahkan hampir tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan (Horst, 2019). Sedihnya, hingga selama pemerintahan demokratis dan kemudian revolusioner 1960-1991 yang mengumumkan modernisasi dan kesetaraan gender, perempuan Somalia masih kurang dapat menikmati kemerdekaannya (Ingiriis & Hoehne, 2013).

Menanggapi hal tersebut sebuah komunitas internasional bergerak dengan membawa agenda *Women Peace and Security* (WPS) yang mendukung adanya kesetaraan gender guna membantu Somalia dalam menghidupkan representasi perempuan dalam publik. Bagian ini akan menelusuri dampak, tantangan dan peluang yang disediakan oleh perang saudara bagi perempuan Somalia, mengungkap bagaimana subordinasi partisipasi perempuan akibat adanya norma sosial, budaya lokal dan menarik perhatian komunitas internasional terhadap hal ini.

1.1 Latar Belakang Konflik Somalia

Somalia merupakan negara yang terletak di benua Afrika tepatnya berada di wilayah Afrika Timur dan berbatasan langsung dengan Ethiopia dan Kenya di sebelah Barat. di sisi Timur Somalia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan di sisi Utara berbatasan langsung dengan Teluk Aden (Bradbury et al., 2010). Somalia juga merupakan salah satu negara yang berada di kawasan strategis yakni di bagian selatan Teluk Aden yang menonjol pada Laut Arabia. Letak geografis Somalia menjadikan negara ini berada di jalur perdagangan dan transportasi dunia yang sangat strategis. Sebagai salah satu negara muslim yang terletak di benua Afrika, Somalia memiliki luas wilayah sebesar 637.657 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 11.031.386 jiwa.

Sebelum merdeka wilayah Somalia terbagi menjadi dua wilayah yaitu Somaliland Inggris dan Somaliland Italia yang kemudian bergabung menjadi satu dan merdeka pada tanggal 1 Juli 1960 dengan nama Republik Somalia. Sebagai negara Federal, Somalia memiliki 18 negara bagian yang dinamakan dengan Gobolka atau daerah dengan Ibukota Mogadishu. Somalia dikenal sebagai salah satu negara di benua Afrika yang sering dirundung konflik yang tidak berkesudahan hingga saat ini. Sejak awal keberadaannya bahkan jauh sebelum negara ini merdeka dan memiliki pemerintahan yang berdaulat, Somalia sudah mengalami konflik internal. Terlebih dimulai pada era demokrasi (1960-1969), kemerdekaan dan lembaga-lembaga negara yang baru dibentuk gagal memenuhi harapan masyarakat. Kemiskinan meningkat dan keamanan memburuk (Elmi & Barise, 2016).

Pada 1 Juli 1960 yang pada saat itu dipimpin oleh presiden Aden Abdullah Osman Daar yang kemudian pada tahun 1967 digantikan oleh Abdirashid Ali Shermarke. Kepemimpinan Presiden Abdirashid Ali Shermarke tidak berlangsung lama, dikarenakan pada tahun 1969 ketika berkunjung ke kota Las Anod, presiden ditembak mati oleh salah satu pengawalnya sendiri. Tidak berselang lama setelah terjadinya penembakan, pemerintah militer atau yang biasa disebut dengan *Supreme Revolutionary Council* (SRC) yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Siad Barre secara kudeta mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan berhasil dikuasai dan Mohamed Siad Barre menjabat sebagai presiden Somalia. Presiden Mohamed Siad Barre menjalankan pemerintahan secara diktator. Banyak kebijakan Presiden Siad Barre yang menyebabkan permasalahan sosial di Somalia semakin besar. Hal tersebut kemudian memicu munculnya kelompok pemberontak yang terbentuk atas dasar kesamaan etnis atau klan maupun kelompok yang memiliki tujuan untuk mengambil alih kekuasaan sesuai dengan identitas etnis/klan mereka, diikuti dengan munculnya kelompok militan Islam yang juga ingin mengambil alih kekuasaan dan mendirikan negara berbasis Islam.

Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok – kelompok yang menginginkan pemerintahan Siad Barre turun semakin meluas, diikuti oleh perang sipil baik antar etnis maupun antar pemberontak dan tentara pemerintah. Pada bulan Oktober 1981 Somalia Utara juga melakukan pemberontakan melawan Siad Barre dan diikuti oleh kelompok politik di tingkat parlemen, hal tersebut menandakan adanya peningkatan kekuatan oposisi yang menentang dan

menginginkan pemerintahan Siad Barre turun. Keadaan tersebut semakin didukung oleh etnis Marehan dan pergantian posisi legislatif dari etnis Mijertyn dan Isaq yang sangat mendukung pemerintahan digantikan oleh para oposisi semakin menguat. Keadaan tersebut membuat pemerintahan Siad Barre semakin melemah dan akhirnya jatuh pada bulan Januari 1991.

Setelah jatuhnya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Siad Barre, Somalia mengalami kekosongan kekuasaan yang menyebabkan kondisi konflik yang sudah terjadi sejak lama di Somalia menjadi semakin parah. Hal tersebut dikarenakan Somalia tidak memiliki institusi pemerintahan yang jelas. Kondisi sosial yang semakin kacau dan berlaut-larut mendorong masyarakat Somalia untuk ikut bergabung ke dalam kelompok milisi tertentu demi memperjuangkan kelangsungan hidup mereka. Keadaan tersebut mendorong munculnya kelompok-kelompok Islam radikal baru yang menginginkan untuk mendirikan negara Islam dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan. Salah satu kelompok militan Islam radikal yang menginginkan untuk mendirikan negara Islam dan melakukan pemberontakan adalah Al-Shabaab al-Mujahideen atau dalam Bahasa arab حركة الشباب المجاهدين (Bradbury et al., 2010).

Dimana pemberontakan tersebut terus berlanjut, menjadikan mereka sebagai penguasa di wilayah ibu kota Somalia, yakni Mogadishu dan wilayah Somalia Tenggara. Mereka membentuk suatu kelompok yang disebut USC atau

United Somali Congress dibawah Pimpinan Muhammad Farrah Aidid. Sementara di bagian Somalia utara dikuasai oleh SNM atau *Somali National Movement* yang mendirikan negara sendiri bernama Republik Somaliland. Buruknya kondisi keamanan meluas ke berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, terjadinya kegagalan panen yang berlarut larut hingga membuat sejumlah bencana kelaparan. Hal ini memicu perhatian salah satu komunitas internasional yakni PBB. Tepat pada bulan Desember 1992, PBB mengirimkan bantuan kemanusiaan dan pembentukan koalisi untuk mengamankan bantuan dari segala ancaman misili-misili setempat (Ahmad, 2012).

Dalam Misi bantuan PBB tersebut, Amerika Serikat yang menjadi pendonor terbesar. Mereka menyumbang lebih dari 20.000 tentara dalam misi perdamaian tersebut untuk kemudian dikirimkan ke Mogadishu untuk menangkap pasukan Aidid yang kerap mengganggu serta melakukan penyerangan terhadap pasukan PBB. Namun naasnya, keberhasilan belum di raih pihak AS dikarenakan tertembaknya helikopter *Black Hawk Down* milik AS oleh bawahan Aidid. Lantas PBB mengirim pasukan tambahan untuk menyokong bantuan menyelamatkan awak helicopter namun Kembali tertembak ke segala penjuru arah. Dimana peristiwa tersebut membuat PBB kuwalahan dan akhirnya memukul mundur pasukannya untuk tidak melanjutkan penangkapan Farrah Aidid. Peristiwa tersebut pula memicu tekanan dari pihak AS untuk tidak melanjutkan intervensinya dalam konflik Somalia (Schultz K, 2015).

SNA atau *Somali National Alliance* selaku penerus USC mengangkat Aidid sebagai presiden Somalia secara sepihak tanpa adanya pengakuan dari dunia internasional maupun kelompok – kelompok di luar SNA. Di tahun 1996 Aidid meninggal dunia yang kemudian pasca-tewasnya Aidid, putranya yang bernama Hussein muhammad farrah aidid menggantikannya untuk memimpin Somalia versi kelompok SNA. Berlanjut tahun di 1998, SNA menyerbu Somalia bagian barat yang pada saat itu dikuasai oleh kelompok klan Rahanweyn. Sebagai bentuk respon serangan tersebut, akhirnya Rahanweyn membentuk kelompok baru yang dinamakan RRA (*Rahanweyn Resisten Army*). Sehingga berbuah manis dimana kemenangan berada di tangan RRA yang berhasil menengahkan pasukan SNA dari Somalia barat. Kemudian, mendirikan wilayah sempalan yang dipimpin kelompoknya sendiri. Diiringi dengan dibentuknya wilayah sempalan lain seperti Somalia utara yang mendeklarasikan wilayahnya bernama Puthland. Sementara di Somalia Selatan Jubaland (Ali, 2018).

Perpecahan wilayah yang disebut negara dalam negara di Somalia semakin mendongkrak semangat pemerintah untuk mengembalikan keutuhan Somalia. Tepat di tahun 2000 diadakannya pertemuan oleh para Panglima perang dan Pemimpin kelompok bersenjata yang ada di sana untuk melakukan pertemuan di Djibouti, dan berhasil membentuk TNG atau *Transnational National Government* yang bertujuan untuk menjadi badan pemerintahan sementara Somalia yang akhirnya diakui oleh dunia Internasional. Yang kemudian berubah nama menjadi TFG (*Transnational Federal Government*).

Namun terdapat tantangan tersendiri untuk kemudian diterima secara domestik karena beberapa negara sempalan yang berada di Somalia enggan melepaskan statusnya sebagai negara sempalan. Disisi lain muncul sebuah Gerakan yang bernama ICU atau *Islamic Courts Union*. Bertujuan untuk menjalankan pemerintahan yang berbasis syariat Islam ke seantero Somalia. Tahun 2006 ICU berhasil menguasai sebagian besar wilayah Somalia Selatan, termasuk Mogadishu (Dagne Ted, 2010).

Salah satu pecahan kelompok ICU itu sendiri ialah Al-Shaabab yang terkenal dengan praktik agama islam versi mereka yang cenderung konservatif dan sering menggunakan taktik bom bunuh diri. Dengan mengusung ideologi agama kelompok Al-Shaabab berhasil menarik simpatik masyarakat Somalia (Shinn, 2011). Menguatnya peran ICU di Mogadishu dikhawatirkan akan semakin menurunkan bahkan menghapus legitimasi masyarakat Somalia terhadap TFG (*Transnational Federal Government*) sebagai pemerintahan sementara bagi Somalia yang secara sah dan diakui dunia internasional, sehingga konflik akan terus terjadi. Namun kini TFG telah berakhir dan akhirnya digantikan oleh Pemerintah Federal Somalia yang didirikan pada tanggal 20 Agustus 2012, setelah berakhirnya mandat sementara Pemerintah Transisi Federal. Pemerintah ini secara resmi terdiri dari cabang eksekutif pemerintah, dan parlemen berfungsi sebagai cabang legislatif (Somali Dialogue Platform, 2017).

1.2 Perlawanan Kelompok Al- Shabaab

Salah satu kasus yang saat ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat Somalia adalah teror yang dilakukan oleh kelompok Al Shabaab. Harakat al-Shabaab al-Mujahidin atau Gerakan Belia Mujahidin. Al-Shabaab merupakan kelompok pemberontak yang berkembang dan aktif di Somalia. Tujuan dari kelompok Al-Shabaab sendiri ialah untuk mendirikan negara Islam dengan hukum yang sesuai dengan syariat Islam dan menghentikan segala aktivitas atau hubungan negara tersebut (Somalia) dari pengaruh negara barat. keberadaannya di Somalia semakin menguat dikarenakan Al-Shabaab bergabung dengan *United Islamic Court* (UIC) untuk menyerang ibu kota Mogadishu dan ingin mengambil alih tata kelola Mogadishu serta sebagian wilayah Somalia di tahun 2006 (Badurdeen & Badurdeen, 2018).

Kelompok teroris Al-Shabaab beserta ideologi radikal yang dimilikinya menyebabkan sejumlah kekacauan massif di Somalia. Aksi yang dilakukannya tak lain dengan menanamkan dan melakukan kerusakan serta aksi teror yang memberi efek menakutkan di seluruh Somalia. Terornya pun dapat mengacaukan sebuah Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM) ketika memulai operasi untuk memulihkan ketertiban dan keamanan Somalia. Akibatnya, kelompok teror Al-Shabaab menjadi sangat meresahkan dan menimbulkan ketakutan, seperti ancaman keamanan bagi masyarakat Somalia. Selain itu, aksi dari kelompok teror Al-Shabaab juga berdampak pada sektor-sektor lain di Somalia, seperti politik, ekonomi, dan sosial.

Pemberontakan Islam Al-Shabaab tetap menjadi kekuatan tempur yang tangguh di Somalia meskipun bertahun-tahun telah menghadapi berbagai guncangan atas operasi yang melawannya. Kekuatan pertahanannya berasal dari kelemahan negara Somalia, fleksibilitas taktisnya serta kemampuannya dalam berbagai hal seperti; menghasilkan pendapatan, menavigasi politik klan, serta kemampuannya dalam menyebarkan pengaruh untuk memperluas jaringan. Secara politik, aksi kelompok teror ini berhasil menjadikan perpolitikan Somalia menjadi tidak stabil karena pemerintahan Somalia masih belum mampu memberikan upaya penanganan dengan baik dan menjamin keamanan masyarakat Somalia.

Sementara di sisi ekonomi, pemberontakan yang dilakukan Al-Shabaab ini menimbulkan kekacauan dalam perekonomian. Dilansir dari data resmi Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) menyatakan bahwa 40% dari populasi masyarakat Somalia mengalami kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang tinggi di Somalia yang diakibatkan oleh kekacauan atas serangan kelompok Al- Shabaab (IFAD, 2020). Mereka juga memanfaatkan dampak dari buruknya iklim Somalia. Somalia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem hal ini menjadi sebuah ladang usaha bagi Al-Shabaab. Al- Shabaab membuat adanya peningkatan persaingan atas sumber daya yang langka dan memperburuk ketegangan dan kerentanan masyarakat yang ada. Kelompok bersenjata Al Shabaab memanfaatkan dampak iklim dengan memposisikan diri sebagai penyedia layanan dan bantuan, dari kegiatannya tersebut mereka dapat mengeksploitasi dampak iklim untuk meningkatkan

pengaruh mereka terhadap masyarakat dan sumber daya. Hal ini memiliki implikasi yang kompleks bagi situasi perdamaian dan keamanan di Somalia (Climate, Peace and Security Fact Sheet, 2021).

Pengaruh lain mengenai ancaman kelompok Al-shabaab di bidang sosial yaitu adanya upaya perekrutan perempuan dalam aksi pemberontakannya. Berdasarkan sebuah observasi dari *International Crisis Group* beberapa wanita telah di rekrut menjadi anggota Al-Shabaab untuk membantu mempertahankan pemberontakan. Beberapa wanita membantu proses perekrutan, menggalang dana, memata-matai, serta menyelundupkan senjata untuk kelompok mereka. Dalam upaya nya tersebut, Al-shabaab nampaknya menggunakan perempuan untuk memerankan sebuah ‘strategi gender’.

Keterlibatan perempuan pada strategi gender Al-Shabaab terutama dalam kegiatan pemberontakan, hal ini justru memberikan ruang sempit bagi perempuan untuk bertindak. Pemberlakuan batasan yang ketat pada perilaku dan akses perempuan ke ruang publik, kurangnya keamanan fisik kepada perempuan dan anak perempuan, bahkan sering kali mereka mengalami sejumlah kekerasan. Dalam budayanya mengenai perempuan, meskipun Al-Shabaab memberlakukan pembatasan terhadap peran perempuan, namun demikian mereka juga memberikan sebuah janji untuk menjamin keamanan bagi mereka secara hukum keluarga Islam (International Crisis Group, 2019).

Dalam penegakan perlindungan terhadap perempuan, Al-Shabaab memberikan hak hak perlindungan tertentu pada perempuan namun dengan menggunakan sistem peradilan yang tidak resmi. Al-Shabaab menjunjung prinsip hukum keluarga Islam. Aturan ultra-konservatif yang diilhami Salafi memberlakukan pembatasan ketat pada perilaku perempuan dan akses ke ruang publik yakni melarang perempuan keluar rumah tanpa *mahram*, atau wali laki-laki (biasanya kerabat), dan membatasi laki-laki dan perempuan bergaul di ruang publik. Hal tersebut memaksa perempuan untuk mengenakan niqab hitam (jubah panjang tak berbentuk yang menutupi seluruh tubuh dan wajah, hanya dengan celah untuk mata).

1.3 Dampak konflik Somalia terhadap perempuan

Ragam faktor pendorong konflik Somalia menjadikannya semakin rumit untuk diselesaikan. Somalia telah dicirikan identik dengan masalah-masalah di tingkat antar negara, intra negara dan antar komunal. Seperti halnya perpecahan berbasis klan, ketegangan antar komunal, radikalisme dan ancaman teroris, tata kelola masyarakat yang buruk, persaingan sumber daya alam serta konflik eksternal dengan negara lain. Dimana perempuan cenderung lebih rentan untuk menjadi korban. Selama beberapa dekade, perempuan Somalia terjebak dalam konflik ketika klan bangkit melawan satu sama lain atau berjuang untuk supremasi politik. Hingga saat ini, banyak perempuan dan anak-anak Somalia yang masih hidup sebagai pengungsi di negara tetangga seperti Kenya dan Yaman. Salah satu konsekuensi utama dari konflik selama beberapa dekade ini adalah kekerasan berbasis seksual dan gender seperti; kekerasan dalam rumah

tangga, pernikahan dini dan paksa, pemerkosaan, pelecehan seksual, mutilasi alat kelamin perempuan, diskriminasi dan penolakan akses terhadap sumber daya termasuk warisan.

Meninjau dari jumlah kekerasan yang diakibatkan oleh konflik somalia, peneliti merangkumnya berdasarkan catatan laporan tahunan oleh *human right watch* pada tiga tahun terakhir yakni 2019, 2020, 2021, yang menunjukkan hasil dimana mengalami lonjakan jumlah korban dan sebagian besar kekerasan diakibatkan oleh bentrokan konflik antar klan, perlawanan operasi keamanan terhadap kelompok Al-Shabaab serta sebagian kecil sebabkan oleh faktor pandemi.

Tabel 2.1 Jumlah kekerasan yang diakibatkan oleh konflik Somalia

No.	Tahun	Jumlah kekerasan terhadap warga sipil	Jumlah kekerasan sexual terhadap perempuan	Keterangan
1.	2019	982	320	Al-Shabab, antar-klan, operasi militer pasukan pemerintah Somalia, pasukan Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM), dan pasukan lain.
2.	2020	1.154	400	Ketegangan politik menjelang pemilu nasional, bentrokan antar-komunal, Al-Shabaab, pandemi COVID-19
3.	2021	596	412	Milisi klan dan Al-Shabaab, pasukan keamanan Jubbaland dan pasukan Puntland

Sumber: <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/somalia> (telah diolah kembali).

Berdasarkan laporan *Human Right watch* yang telah dirangkum dari tahun 2019-2021 terlihat sedang terjadi lonjakan yang signifikan terhadap kekerasan yang terjadi di Somalia. Di tahun 2019, sebuah misi bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia (UNSOM) melaporkan pada bulan Oktober sebesar 982 korban terdiri dari masyarakat sipil. Jatuhnya korban tersebut tak lain diakibatkan oleh adanya serangan sekelompok Al-Shabab, kekerasan antar-klan dan intra-keamanan, bersama dengan operasi militer sporadis terhadap Al-Shabab oleh pasukan pemerintah Somalia, pasukan Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM), dan pasukan asing lainnya. Di tahun yang sama pula, terdapat jumlah kasus kekerasan seksual pada perempuan sebesar 320 perempuan dan anak perempuan. Dimana hal tersebut berupa pemerkosaan, penculikan, penyekapan (Human Right Watch, 2019).

Di tahun 2020, sebesar 1.154 masyarakat sipil menjadi korban dari konflik yang terjadi di Somalia. Enam puluh tujuh persen di sebabkan oleh serangan sembarangan dan terarah oleh Al- Shabaab. Sebagian besar serangan menggunakan alat peledak improvisasi atau *improvised explosive device* (IED) yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Islam Al-Shabaab¹. Kekerasan lain dilakukan oleh kelompok kekerasan antar-klan dan kekuatan intra-keamanan yang di motivasi oleh pembunuhan dengan motif balas dendam karena perebutan wilayah. Hal ini menyebabkan kematian warga sipil, cedera, dan pemindahan

¹ Alat peledak improvisasi (IED) adalah bom yang dibuat dan digunakan dengan cara selain aksi militer konvensional . Ini dapat dibuat dari bahan peledak militer konvensional, seperti peluru artileri, yang dipasang pada mekanisme peledakan. IED umumnya digunakan dalam operasi teroris atau perang non-konvensional asimetris oleh gerilyawan pemberontak atau pasukan komando di teater operasi .

penduduk. Sebagian kerusakan lain dilakukan oleh operasi militer sporadis, termasuk serangan udara, upaya perlawanan terhadap Al-Shabab oleh pasukan pemerintah Somalia, Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM), dan pasukan asing lainnya.

Gender Based violence (GBV) yang berupa kekerasan fisik, kekerasan pasangan intim atau *intimate partner violence* (IPV) serta pemerkosaan adalah jenis kekerasan paling umum yang dialami perempuan dan anak perempuan Somalia. Di tahun 2020 kurang lebih 410 kasus kekerasan perempuan dilaporkan, terutama anak perempuan, menjadi korban perkosaan dan *intimate partner violence* yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik di Somalia. Hal ini merupakan suatu peningkatan yang luar biasa dimana meningkat sebesar 80 persen dibandingkan tahun 2019 (Human Right Watch, 2020).

Pada tahun 2021 Misi Bantuan PBB di Somalia (UNSOM) mencatat sedikitnya terdapat 596 korban sipil, termasuk 296 kasus pembunuhan. Sebagian besar kekerasan disebabkan oleh serangan membabi buta oleh Al-Shabab dengan menggunakan alat peledak improvisasi (IED), bom bunuh diri, dan penembakan, serta pembunuhan berencana. *Human right watch* memverifikasi total kasus GBV yang dialami perempuan terkait konflik sebanyak 400 anak perempuan, 12 perempuan dan 7 anak laki-laki, terutama dikaitkan dengan milisi klan dan Al-Shabaab (Human Right Watch, 2021).

2.3.1 Sexual and Gender Based Violence (SGBV)

Kekerasan Berbasis Seksual dan Gender atau *Sexual and Gender Based Violence* (SGBV) terjadi sangat umum di Somalia, meskipun persebaran dan luasnya tidak sepenuhnya jelas karena kurangnya sistem pencatatan dan informasi yang tepat. Beberapa informasi yang ditemui diharapkan meninjau perkembangan SGBV di Somalia, dimana berdasarkan laporan *United Nations Population Fund* (UNFPA) SGBV mengalami peningkatan kasus di setiap tahun. pada tahun 2019 hingga 2022 akhir, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus sebesar 8% dari tahun 2019 yang berkisar 65% insiden kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan meningkat di tahun 2022 sebesar 73%.

Kekerasan sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, bahkan termasuk orang-orang yang seharusnya melindungi korban. Insiden tersebut terjadi pada orang-orang yang rentan seperti gadis-gadis muda di kamp-kamp pengungsi internal di mana kekerasan dilakukan oleh anggota masyarakat atau tuan rumah. Biasanya, SGBV ditangani di tingkat masyarakat oleh para tetua adat dan pemuka agama tanpa melalui pengadilan. Dalam kebanyakan kasus, pelaku kekerasan tidak dihukum sementara korban kebanyakan tidak mendapatkan keadilan yang semestinya didapatkan. sehingga korban masih jarang mendapatkan keadilan karena pemberian layanan yang tidak efisien (UNFPA, 2022).

1.3.1 Peran Perempuan Somalia Terhadap Konflik

Selama dua dekade terakhir, masyarakat Somalia telah bergulat dengan berbagai upaya untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas di Somalia. Perempuan Somalia mereka tak serta merta pasif pada aksi mereka dalam perwujudan perdamaian. Sejarah mencatat konflik di Somalia melibatkan peran perempuan seperti berkorban tanpa pamrih untuk membawa perdamaian atau menjaga perdamaian dengan segala kemampuan dan upaya, meskipun nyawa taruhannya (Horst, 2019). Namun seiring dengan perkembangannya terdapat faktor yang mempengaruhi perubahan peran perempuan seperti; Somalia masih belum menemukan pijakannya setelah bertahun-tahun mengalami ketidakstabilan, serta dorongan politik untuk memasukkan perempuan sebagai mediator lokal atau membangun kapasitas sebagai negosiator masih tergolong rendah. Hal ini menjadikan sebagian besar upaya ini, peran perempuan secara mencolok hilang. Misalnya, mereka hanya memiliki sedikit (jika ada) perwakilan dalam upaya pascakonflik.

Kendati demikian, perempuan telah membuat banyak pengorbanan dalam proses perwujudan perdamaian termasuk salah satunya ialah menikah dengan klan lain untuk memperoleh adanya perdamaian. Beberapa dari mereka tidak segan segan menjadi istri dari klan yang bertikai sebagai '*Godobtiir*' (perjodohan yang kadang-kadang sifatnya memaksa) yakni pernikahan seorang gadis ke klan yang merasa dirugikan untuk memastikan kesepakatan damai dengan klan lain.

Selain dari dampak langsung perang saudara terhadap perempuan, terdapat pula beberapa efek tidak langsung dari perang. Matt Bryden dan Martina Steiner menyebutnya 'feminisasi kemiskinan', yakni kondisi Ketika banyak perempuan hidup sendiri atau tanpa kerabat untuk mendukung mereka. Beberapa perempuan di Somalia adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga atau untuk memenuhi kehidupan sendiri (Ingiriis & Hoehne, 2013). Segregasi gender dalam pekerjaan dimana sebagian besar pekerjaan yang didominasi oleh laki laki menempatkan mereka pada kondisi kemiskinan. Dalam hal ini perempuan kemungkinan besar menanggung beban perang selama beberapa dekade terakhir.

Tak hanya menjadi korban, perempuan Somalia juga ikut berperan dalam konflik yang terjadi di Somalia. Berdasarkan konteks Afrika kontemporer beberapa wanita juga ikut menjadi pejuang dalam perang. Seorang wanita bersenjata muda berbicara tentang motivasinya untuk bertarung dan pengalamannya selama tahun-tahun perang di selatan pada awal 1990-an. Dia menyebutkan bahwa dia sedang mencari 'keadilan dan kebebasan'. Kebenciannya terfokus pada rezim diktator lama di mana dia diperlakukan secara tidak adil. Mereka bergabung dengan Kongres Persatuan Somalia *Union Somali Congress* (USC) dan membantu menggulingkan Mohamed Siyad Barre. Beberapa juga ikut berperang melawan pasukan Amerika yang sedang mengejar seorang panglima perang di Mogadishu (Ingiriis & Hoehne, 2013).

1.4 Kondisi Budaya dan Norma Sosial dalam Masyarakat Terhadap Subordinasi Partisipasi Perempuan Somalia

Status perempuan Somalia dalam masyarakat bukanlah suatu hal yang baru. Selama puluhan tahun perempuan Somalia telah membentuk jaringan nasional yang dinamis dari sebuah organisasi sosial dalam menanggapi dampak buruk dari pemerintahan yang otoriter selama kurang lebih dua puluh lima tahun (Putland development research, 2020). Namun meskipun demikian di beberapa kasus membentuk adanya bias gender yang menempatkan perempuan pada kondisi yang tidak setara dengan laki laki baik dari segi pekerjaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan lain-lain. Sebagian karena norma sosial budaya yang lebih mengunggulkan laki laki dan sebagian karena kesadaran pendidikan yang buruk.

Sejak tahun 1983, telah terjadi penurunan yang signifikan dalam pendidikan dasar Somalia. Studi menunjukkan Somalia memiliki salah satu tingkat pendidikan dasar terendah di dunia (UNICEF Somalia, 2018). Tidak diragukan lagi bahwa pendidikan berperan dalam mendorong kemajuan sosial ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan bangsa yang tentunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Program pendidikan bersama untuk anak laki-laki dan perempuan yang beroperasi di pasca-kemerdekaan Somalia, justru menunjukkan kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan berada di tingkat yang rendah.

Adanya *disparity gender* yang meluas telah mengganggu sistem pendidikan². Kurang dari setengah jumlah pelajar Somalia adalah perempuan dan hanya 37,8% (berumur antara 15 dan 24 tahun) mengalami melek huruf, dibandingkan dengan pria yang memiliki tingkat melek huruf sebesar 54,3% (*Human Right Watch*, 2020). Hal lain yang membuktikan adanya *disparity gender* yaitu berdasarkan hasil observasi dengan beberapa responden perempuan Somalia yang dilakukan oleh Oxfam (Gerakan global atau konfederasi internasional guna memerangi ketidaksetaraan untuk mengakhiri kemiskinan dan ketidakadilan) menghasilkan data bahwa akses ke pendidikan tinggi tetap tidak terjangkau oleh banyak perempuan muda karena tingginya biaya dan mobilitas yang terbatas. Dari 100 responden, pada tingkat pendidikan tinggi mereka menjawab dengan hanya 10,1% responden perempuan yang pernah mengenyam pendidikan menengah dan 7,53% responden perempuan memiliki gelar sarjana. Belum ada data terkait perempuan yang menerima gelar universitas lanjutan seperti gelar master.

Berdasarkan laporan kesenjangan gender global, di Somalia tahun 2020 menunjukkan bahwa paritas gender sebesar 68,6% yang berarti masih jauh dari jangkauan dan memiliki implikasi serius pada pertumbuhan daya saing serta kesiapan suatu negara untuk masa depan (IIAG, 2020). Pada kenyataan yang terjadi di Somalia setelah runtuhnya negara adalah segregasi gender di sekolah (*Gender in Somalia Brief*, n.d.). Tingkat ketidaksetaraan yang diterima di

² Disparity gender adalah perbedaan akses perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya, status dan kesejahteraan yang biasanya menguntungkan laki-laki dan sering dilembagakan melalui hukum, keadilan dan norma sosial.

masyarakat saat ini lah yang membuat efek pendidikan ini hampir tidak signifikan.

Di sisi lain pada tingkat pekerjaan, produk domestik bruto (PDB) per kapita Somalia secara konsisten berada di peringkat lima terendah di dunia sepanjang dekade terakhir dan pada tahun 2020 menjadi salah satu yang terendah kedua di dunia. Sebuah Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan partisipasi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin berkisar pada umur (15-64) menunjukkan angka kesenjangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang cenderung tinggi di Somalia.

Gambar 2.1 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Berdasarkan Jenis Kelamin % (Populasi Usia 15+) (Perkiraan Model ILO)



Sumber: Gender data The World Bank (telah diolah kembali).

Berdasarkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai angka partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan berumur (15-64) pada 2016-2020, pertama pada 2016 partisipasi Angkatan kerja laki laki 47,7%

sedangkan perempuan 21%, tahun 2017 Laki-laki 47,5% dan perempuan 21%, tahun 2018 laki-laki 47,4 dan perempuan 21, tahun 2019 laki laki 47,2 dimana perempuan masih di angka yang cenderung sama dengan tahun sebelumnya, dan di tahun 2020 angka partisipasi laki laki 46,7% sedangkan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan diperkirakan menurun yaitu 20,9%, namun angka tersebut tergolong relatif tidak jauh berubah selama 10 tahun terakhir (World Bank, 2020).

1.4.1 Sistem Klan (*Clannism*)

Politik eksklusif telah menjadi pendorong sejarah dalam konflik Somalia. Terdapat empat klan dominan di Somalia yakni Hawiye, Darod, Isaaq, dan Dir, beserta dengan berbagai kelompok minoritas yang tinggal di Somalia dengan perkiraan dengan jumlah mereka yakni sepertiga dari total populasi Somalia; sekitar 2.000.000 orang. Kelompok minoritas termasuk Bantu, Bravenese, Rerhamar, Bajuni, Eyle, Galgala, Tumul, Yibir dan Gaboye (Relief, 2017). Kelompok-kelompok ini terus hidup dalam kondisi kemiskinan yang parah dan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pengucilan. Adanya sistem klan tak menutup kemungkinan mendorong adanya manipulasi politik klan, dan penggunaan klan untuk memicu kebencian antar warga. Perang memperkuat adanya sistem perbedaan klan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini berpuncak pada apa yang disebut sistem perwakilan politik yang menyatakan bahwa empat klan mayoritas ditambah klan minoritas memiliki hak atas representasi numerik (Horst, 2017). Sistem klan tersebut juga mempertimbangkan fakta bahwa perempuan tidak memiliki perwakilan politik dalam sistem klan.

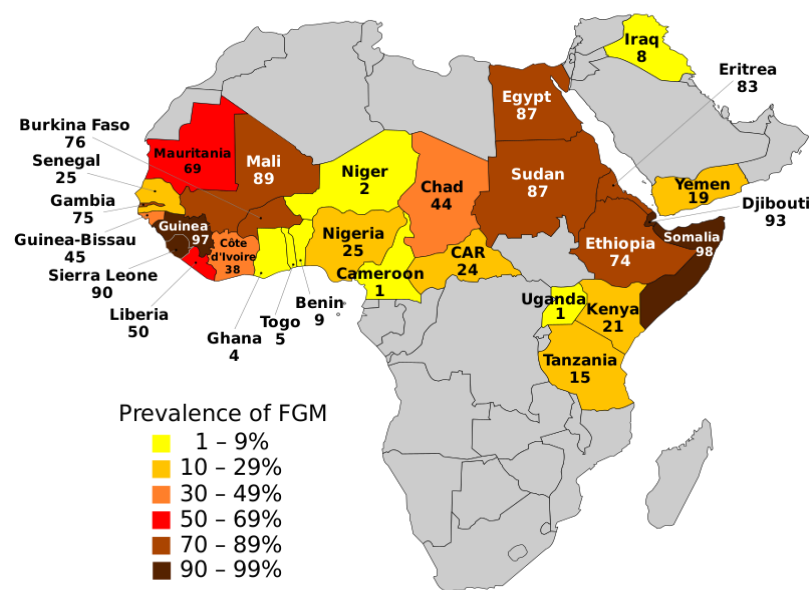
Secara struktural sistem klan kadang merugikan perempuan. Sistem klan yang didominasi laki-laki dan tidak adanya pendekatan sistematis untuk mempromosikan inklusivitas, sebagian besar perempuan Somalia tetap terkucilkan dari proses politik dan pengambilan keputusan utama. Serta mendapat tekanan bahwa mereka terus kurang terwakili dalam keputusan nasional, regional dan badan pembuat kebijakan. Ketidakseimbangan gender dalam partisipasi politik, kepemimpinan dan pengambilan keputusan tersebut merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan.

1.4.2 Budaya Somalia

Aspek lain dari tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan adalah budaya Somalia, yang membatasi perempuan di lingkungan rumah dan keluarga. Di Somalia, lebih dari 90 persen atau lebih anak perempuan dan perempuan dewasa, telah menjadi sasaran mutilasi alat kelamin perempuan atau *Female genital mutilation* (Fried et al., 2013). Meskipun praktik tersebut memiliki konsekuensi kesehatan bagi perempuan dan anak perempuan - termasuk rasa sakit, pendarahan, cacat permanen dan bahkan kematian hal tersebut tetap dilakukan dengan alasan sebagai suatu tradisi turun - temurun. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan risiko mutilasi alat kelamin perempuan yang terus berlanjut, dengan PBB memperkirakan lebih dari dua juta anak perempuan akan menjadi korban dalam sepuluh tahun ke depan (Lewis, 2021).

Dalam sebuah laporan UNICEF yang dirilis pada Desember 2019, terdapat data yang memperlihatkan bahwa prevalensi praktik FGM di Somalia masih menduduki peringkat pertama dari negara-negara lainnya di Afrika.

Gambar. 2.2 Jumlah prevalensi FGM



Sumber: Data and Analytics Section – Division of Policy and Strategy
UNICEF, 2019.

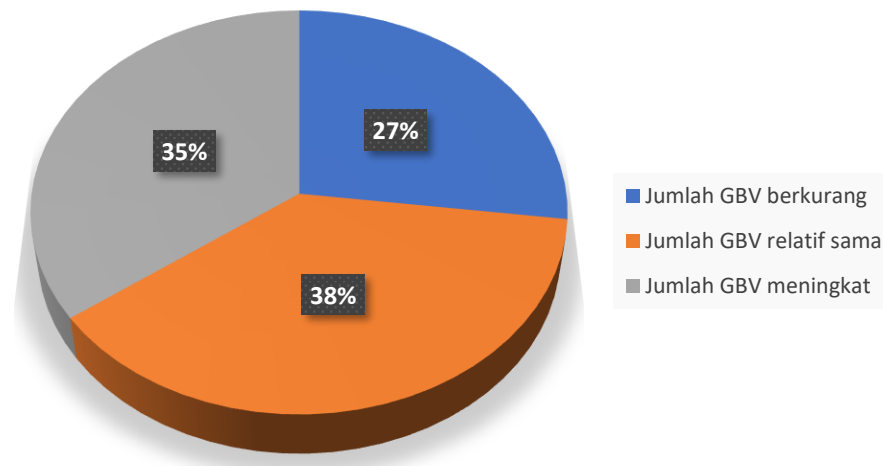
Berdasarkan laporan UNICEF mengenai jumlah FGM di lingkup Afrika. Somalia menunjukkan angka tertinggi setelah negara Guinea yaitu sebesar 98%. Presentase jumlah tersebut kian mengalami peningkatan. Sekitar 80% perempuan Somalia melakukan praktik FGM dengan Tipe III (di Somalia disebut dengan “*Gudniinka fircooniga ah*”). Sementara disatu sisi, 18% lainnya melakukan praktik FGM dengan Tipe II.

Somalia Health and Demographic Survey (SHDS) menunjukkan tingkat *Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)* pada wanita berusia 15–49 tahun pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan dimana angka prevalensi perempuan yang mengalami FGM yaitu sebesar 99,2%, sebagian besar dari mereka memiliki dampak fisiologis, seksual dan psikologis jangka pendek dan jangka panjang³. Dalam hal ini menandai bahwa kekerasan Berbasis Seksual dan Gender yang terjadi di Somalia masih tergolong massif terjadi. FGM menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling umum. Sejak merebaknya COVID-19, perempuan, dan anak perempuan menghadapi risiko FGM yang lebih besar (SHDS, 2019).

Hasil survey yang dilakukan oleh UNFPA Somalia terkait laporan kajian cepat GBV/FGM dalam Konteks Pandemi COVID-19 di Somalia, dengan jumlah variabel berdasarkan gender Perempuan (446) dan laki-laki (310) dengan total 756 masyarakat yang ikut serta menjadi responden dalam survei tersebut. Menambahkan bukti bahwa, Covid -19 memicu peningkatan terhadap adanya SGBV di Somalia. Survei tersebut merekam berbagai insiden GBV dari berbagai wilayah Somalia termasuk Galmudug, Hirashabelle, SWS, Jubaland, Putland dan Somaliland.

³ Menurut WHO Female Genital Mutilation (FGM) adalah prosedur yang dengan sengaja mengubah atau menyebabkan cedera pada organ kelamin perempuan karena alasan non-medis, dimana prosedur ini tidak memberikan manfaat kesehatan bagi wanita. Prosedur ini dapat menyebabkan pendarahan hebat dan masalah kencing dan kemudian kista, infeksi, serta komplikasi saat melahirkan dan peningkatan resiko kematian bayi baru lahir. Biasanya prosedur ini dilakukan terhadap gadis muda pada usia 15 tahun.

Gambar 2.3 Survey Terhadap Insiden GBV Selama COVID-19



Sumber: UNFPA GBV/FGM Rapid Assessment Report, 2020 (telah diolah kembali).

Dari 756 masyarakat Somalia terdapat 100 Responden (anggota masyarakat) yang menjawab berdasarkan pertanyaan terkait “apakah GBV berkurang, relative sama atau GBV meningkat?”. Sebesar 38 persen (25% Perempuan dan 13% laki-laki) responden mengatakan telah terjadi peningkatan insiden GBV, 35 persen (17% Perempuan dan 18% laki-laki) insiden GBV yang ditunjukkan adalah sama dan 27 persen (17% perempuan dan 10% laki-laki) melaporkan telah menjadi berkurang (UNFPA, 2020).

Mayoritas responden 38 persen tinggal di sebuah kamp terorganisir; 33 persen tinggal di inang masyarakat, 16 persen tinggal di desa/ rumah asal, 8 persen tinggal di sebuah terorganisir pemukiman, 3 persen responden adalah pengungsi yang kembali tinggal di kamp pengungsian dan 2 persen tinggal di gedung publik (sekolah, bangunan terbengkalai dll). Beberapa responden perempuan lainnya menanggapi pertanyaan terkait insiden GBV yang terjadi pada mereka selama

pandemic Covid-19, sebesar 5 persen mengindikasikan adanya keterbatasan sumber penghasilan karena pembatasan gerak; 14 persen peningkatan risiko kekerasan fisik di rumah; 12 persen menunjukkan peningkatan stres psikososial, 11 persen mencatat peningkatan risiko kekerasan pasangan intim. 4 persen berpendapat peningkatan risiko serangan saat pergi ke pasar atau berjalan di daerah terpencil sementara 3 persen mencatat peningkatan risiko serangan saat mengunjungi fasilitas umum.

1.5 Upaya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan oleh UNSOM

Isu jangka panjang yang mendalam seputar inklusivitas dan kesetaraan dalam struktur politik serta pemerintahan negara yang semakin menghambat adanya pembangunan negara. Kurangnya perempuan dalam representasi publik serta tidak adanya perwakilan perempuan yang adil akan ada masalah lebih lanjut dalam kondisi demokrasi dan hak asasi manusia yang semakin memburuk karena struktur pemerintahan yang gagal mewakili suara begitu banyak perempuan. Hal tersebut juga berdampak pada gagalnya proses Pembangunan negara (Nugroho, 2008). Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan hal mendasar dalam memastikan perdamaian dan kemajuan yang adil, yakni menciptakan kondisi kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dengan melindungi hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi, bias dan prasangka.

Pemberdayaan partisipasi perempuan Somalia sangat penting dalam membangun negara Somalia yang inklusif, dan adil. Sebuah komunitas Internasional yakni PBB melalui misi perdamaian yang telah dibentuknya yakni (*United Nations Assistance Mission of Somalia*) UNSOM yang mana ditugaskan untuk melakukan upaya terencana untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan, partisipasi publik serta kesetaraan gender terintegrasi dengan baik dan dipromosikan sepenuhnya demi terciptanya perdamaian dan keadilan.

1.5.1 Misi Bantuan UNSOM (*United Nations Assistance Mission of Somalia*)

Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia (UNSOM) didirikan pada 3 Juni 2013 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2102. Setelah mendapatkan penilaian komprehensif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mendukung pembentukan Pemerintah Federal Somalia. Dimana mandat saat ini berlaku hingga 31 Oktober 2023. Dengan suara yang bulat mengadopsi resolusi 2102 (2013), Dewan Keamanan memutuskan bahwa mandat UNSOM akan mencakup pemberian nasihat kebijakan kepada Pemerintah Federal dan *The African Union Mission in Somalia* (AMISOM) tentang pembangunan perdamaian dan pembangunan negara di bidang pemerintahan, sektor keamanan reformasi dan supremasi hukum (termasuk pelepasan kombatan), pengembangan sistem federal (termasuk pembentukan negara), tinjauan konstitusional, demokratisasi dan koordinasi dukungan donor internasional (Resolution 2592,

2021).

Di antara fungsi mandat lainnya, salah satu fungsi utama UNSOM yakni untuk membantu membangun kapasitas Pemerintah Federal guna mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan, mempromosikan perlindungan anak, mencegah kekerasan seksual dan berbasis gender terkait konflik, dan memperkuat lembaga peradilan. Mereka juga memiliki wewenang untuk memantau, membantu menyelidiki dan melaporkan kepada Dewan Keamanan atas setiap penyalahgunaan atau pelanggaran hak asasi manusia atau hukum humaniter internasional yang dilakukan di Somalia, atau setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak atau perempuan. Sejalan dengan keputusan Dewan Keamanan, Kantor UNSOM berbasis di kota Mogadishu, Ibu kota Somalia. Dimana pada sistemnya, sekretaris Jenderal secara rutin memberi tahu kepada Dewan Keamanan tentang pelaksanaan mandat UNSOM melalui laporan triwulanan.

1.5.2 Memajukan Kesetaraan Gender dan Agenda partisipasi Perempuan, Perdamaian dan Keamanan

Memajukan kesetaraan gender dan Agenda Wanita, Perdamaian dan Keamanan atau *Women, Peace and Security* (WPS) merupakan bagian integral dari pekerjaan *United Nations Assistance Mission of Somalia* (UNSOM). Ini adalah salah satu kewajiban UNSOM untuk memastikan bahwa isu-isu gender dan WPS ditangani serta dimajukan melalui mandat UNSOM secara keseluruhan, termasuk dalam upaya advokasi terhadap resolusi DK PBB No 1325, serta upaya memajukan partisipasi perempuan dalam proses pencegahan konflik, proses pembangunan perdamaian dan pembangunan negara yang termasuk pada partisipasi di bidang politik dan keamanan pertahanan.

Women, Peace and Security (WPS) sendiri pertama kali masuk dalam agenda Dewan Keamanan pada tahun 2000, dengan diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan 1325 tentang WPS. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya jumlah perempuan yang dilibatkan dalam proses perdamaian formal yang tetap rendah dan banyak perjanjian perdamaian tidak memasukkan ketentuan gender yang cukup menangani kebutuhan keamanan dan pembangunan perdamaian perempuan meskipun banyak komitmen dan inisiatif global dan regional. Sejalan dengan hal ini Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian mendukung upaya yang meningkatkan keterlibatan perempuan dimanapun, mengintegrasikan kesetaraan gender, dan membentuk strategi berdasarkan prioritas konstituen hak-hak perempuan.

Resolusi Dewan Keamanan 1325 (2000) tentang WPS didukung oleh negara-negara anggota dan representatif secara geografis, serta didorong oleh konstituen global yang kuat dari organisasi masyarakat sipil perempuan. Dalam resolusi ini memiliki kekuatan hukum yang dapat bersifat mengikat apabila berhubungan dengan keberlangsungan dalam hal perdamaian dan keamanan Internasional. Somalia bukan termasuk negara anggota PBB meskipun demikian Resolusi ini memiliki daya hukum yang sifatnya cukup mengikat yang mana didasarkan pada pasal 2 ayat 6 Piagam PBB yang berbunyi:

“The organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as maybe necessary for the maintenance of international peace and security”.

Dimana dalam menjamin sebuah negara bertindak pada prinsip prinsip terhadap Resolusi Dewan Keamanan didasarkan adanya keperluan guna mewujudkan adanya perdamaian dan keamanan Internasional. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 merupakan resolusi pertama yang menghubungkan partisipasi perempuan dengan agenda perdamaian dan keamanan. Dengan melihat dampak konflik terhadap perempuan dan kontribusi perempuan terhadap resolusi konflik serta perdamaian yang berkelanjutan. Agenda WPS sering digambarkan dalam empat pilar: partisipasi dan keterwakilan, pencegahan, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan.;

1. Partisipasi: bertujuan untuk memastikan partisipasi dan pengaruh perempuan yang setara dengan laki-laki dan mendorong kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan perdamaian dan keamanan di tingkat nasional, lokal

dan internasional. Hal ini mencakup penunjukan lebih banyak perempuan, termasuk negosiator, mediator, penjaga perdamaian, polisi dan personel kemanusiaan, serta dukungan terhadap inisiatif perdamaian perempuan setempat.

2. Perlindungan: Perlindungan memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak perempuan dilindungi dan dipromosikan dalam situasi negara yang terdampak konflik atau krisis kemanusiaan lainnya. Hal ini termasuk perlindungan dari *Gender Based Violence* secara umum dan jenis kekerasan seksual lainnya.
3. Pencegahan: pilar ini berfokus pada 'pencegahan konflik dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik dan pasca-konflik. Hal ini mencakup pengintegrasian pertimbangan gender ke dalam sistem peringatan dini konflik dan melibatkan perempuan serta kebutuhan spesifik mereka dalam kegiatan pencegahan konflik dan perlucutan senjata. Hal ini juga mencakup langkah-langkah untuk mencegah GBV dengan memerangi impunitas dan meningkatkan penuntutan atas kekerasan seksual terkait konflik.
4. Bantuan dan pemulihan: bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan bantuan khusus perempuan dan anak perempuan terpenuhi. Misalnya, dalam repatriasi dan pemukiman kembali, program perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi desain kamp pengungsi, dukungan kepada pengungsi internal (IDP) dan dalam penyampaian bantuan kemanusiaan. Pilar ini juga

mendorong penguatan kapasitas perempuan untuk bertindak sebagai agen dalam proses pemberian bantuan dan pemulihan dalam konflik dan pasca-konflik.

Perempuan mempunyai hak untuk berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam proses perdamaian. Namun, sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa perempuan sering kali tidak diikutsertakan dalam partisipasi publik. Hal ini berkonsekuensi buruk terhadap cara mencapai perdamaian berkelanjutan dan keamanan manusia. Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325 merupakan resolusi penting yang mengakui pentingnya perspektif gender dalam perdamaian dan keamanan. Berdasarkan kerangka hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 merupakan salah satu resolusi terkait berfungsi sebagai alat advokasi yang penting untuk memajukan agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS).